

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2006). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2011). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. (2013). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2010). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2011 *Tentang Klasifikasi Anggaran*. (2011). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. (2014). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (2004). Jakarta.
- Alfarisi, H (2015). 'Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi empiris pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat'. Skripsi: *Universitas Negeri Padang*, hlm. 1-25.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan dan pertanggung jawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Jakarta Selatan: Salemba.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia Periode 2014-2016.
- Cohen, S. 2006. 'An Empirical Investigation of Audit Effort and Pricing in the Public Sector: The Case of Greek LGOs'. SSRN November.
- Coll, M.T.B., Prior, D and Ausina, E.M. (2004). 'On The Determinants Of Local Government Performance: A Two stage non parametric Approach'. *European Economic Review*.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2014). *Corporate Social Responsibility*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A & Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Julitawati, E., Darwanis, dan Jalaludin. (2012). 'Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi aceh'. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 1 No. 1, hlm. 15.
- Julitawati, E., Darwanis, dan Jalaludin. (2012). 'Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi aceh'. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 1 No. 1, hlm. 15.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*, Yogyakarta: Andi.
- Marfiana, N dan Kurniasih, L. (2013). 'Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota'. *Sustainable Competitive Advantage (SCA) Vol.03 No.01*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Masdiantini, P.R., & Erawati, N.M.A. (2016). 'Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan'. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14 No.02*. Universitas Udayana. (Hlm 1150-1182).
- Medan Bisnis.com (2017). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kinerja Buruk. Medan. Diakses 25 Januari 2018, dari <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/05/24/300502/pemprovs-u-kinerja-buruk/>
- Muhayanah, F.A. (2016). 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013'. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mulyani,S., & Wibowo, H. (2017). 'Pengaruh belanja modal, Ukuran Pemerintah daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah'. *KOMPARTEMEN*, Vol. 15 No. 1, hlm. 1-10.

- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba.
- Novyandra, R. (2016). 'Pengaruh Belanja Modal, Revenue, *Leverage Size* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2014'. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). 'Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening studi kasus di propinsi jawa tengah'. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol.01 No. 02*. Universitas Diponegoro. (Hlm 1-14).
- Prasasti, S. E., & Sari, R. P. (2015). 'Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah'. *Akmenika*, Vol. 12, No. 1, hlm. 1-13.
- Sari, I. P. (2016). 'Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah'. *Jom Fekon Vol.3, No.1*, Februari 2016, hlm. 679-692.
- Safyra & Agust (2016). Menyoal Desentralisasi Fiskal dan Imbas Pemekaran Daerah. Diakses 30 Januari 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160913004402-84-157786/menyoal-desentralisasi-fiskal-dan-imbis-pemekaran-daerah>
- Sesotyaningtyas, M. (2012). 'Pengaruh *Leverage*, Ukuran legislatif, *intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah'. *Accounting Analysis Journal Vol.1 No.1*, Agustus 2012, hlm. 1-6.
- Simanullang, G. (2013). 'Pengaruh Belanja Modal, *Intergovernmental Revenue* Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012'. *Umrah Journal Of Accounting Vol. 01 No 01*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. (Hlm 01-24).
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tsabit (2017). Realisasi PAD Kota Banjar Masih Rendah. Diakses 27 Januari 2018, dari <https://www.harapanrakyat.com/2017/11/realisasi-pad-kota-banjar-masih-rendah/>

